

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak dalam pembangunan dari masa ke masa dituntut untuk terus mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan nasional maupun internasional. Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan instrumen penting di setiap lembaga pemerintahan. Sentralisasi kekuasaan dan keuangan daerah pada masa sebelum era reformasi telah banyak memberikan pengalaman kepada masyarakat daerah atas ketimpangan yang terjadi mengenai pembagian hasil dan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan pergolakan-pergolakan di daerah untuk menuntut pemberlakuan otonomi khusus atau bahkan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rasa ketidakpuasan tersebut. Salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya kinerja suatu organisasi yang tidak efektif dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagai unsur dari suatu *Good Governance*.

Unsur keuangan dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harus berpegang tetap pada prinsip-prinsip manajemen keuangan (anggaran) yang efektif dan efisien.

Prinsip manajemen keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan meliputi: akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), transparansi, dan pengendalian.

Organisasi dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh sehingga pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian kinerja organisasi adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam organisasi yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.

Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Bandung adalah salah satu instansi pemerintahan yang berada di lingkungan Kabupaten Bandung yang didirikannya secara umum untuk membantu mengkaji data dan berbagai permasalahan yang menyangkut bidang penanaman modal sebagai bahan masukan kepada pimpinan, sehingga data hasil kajian tersebut dapat memudahkan pimpinan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang penanaman modal secara cepat dan akurat dengan harapan iklim investasi di Kabupaten Bandung akan lebih akomodatif dan kondusif bagi para investor.

Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung (BPMP), peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi. Adapun permasalahan dalam kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pada saat ini adalah kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha hanya mencapai 87,4% dan kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal hanya mencapai 84,4%. Berikut ini adalah tabel bukti adanya hambatan didalam pengelolaan keuangan daerah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung (BPMP) dalam bentuk capaian realisasi kinerja pada tahun 2014, sebagai berikut:



Tabel 1.1
Rekapitulasi kegiatan BPMP tahun anggaran 2014

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		%	Sisa
		Anggaran	Realisasi		
A.	ANGGARAN MUTLAK DAN WAJIB BPMP				
I.	BELANJA LANGSUNG MUTLAK				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	530.317.350	520.548.600	98,15%	14.700.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.583.000	42.583.000	100%	0,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.100.000	20.100.000	100%	0,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.497.000	17.497.000	100%	0,-
II.	BELANJA LANGSUNG WAJIB				
a.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
1.	Kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar, kecil dan menengah.	224.822.500	216.536.3.000	96,3%	8.286.200,-

2.	Kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha.	149.485.000	131.001.000	87,4%	18.484.000,-
3.	Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal	249.866.250	209.995.250	84,4%	39.871.000,-
4.	Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	249.975.000,-	229.922.000,-	80%	20.053.000,-
5.	Penyelenggaraan pameran Investasi	374.970.000	374.598.000	99,9%	372.000,-
b.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
1.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.	99.662.500	93.562.500	93,9%	6.075.000,-
2.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.	149.962.500	140.229.000	93,5%	9.733.500,-
c.	Program Penyiapan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah.				
1.	Kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.	249.975.000	239.362.000	95%	10.613.000,-

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, 2014.

Peneliti juga menemukan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Berikut ini adalah tabel bukti adanya hambatan didalam kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung (BPMP), sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kualitas Sumber Daya Manusia guna peningkatan dalam pelayanan

No	Narasi	Tolok Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Capaian Program	Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang belum tergali secara optimal	100 %	-
2	Masukan	Jumlah dana	Rp. 249.975.000,-	-
3	Keluaran	Dana yang dikeluarkan	Tersusunnya dokumen rencana untuk investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bandung.	Rp. 229.922.000,-
4	Hasil	Evaluasi capaian program kualitas sumber daya manusia	100%	80%

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, 2014.

Pada saat pelaksanaan suatu kegiatan atau program tersebut pasti terdapat suatu hambatan, diduga salah satu faktor yang mengenai pelaksanaan kinerja organisasi sudah cukup baik tapi tetap masih perlu peningkatan kembali, sedangkan kinerja pegawai dalam mengelola keuangan masih belum optimal, hal ini bisa terlihat dari realisasi anggaran tahun 2014 yang di indikasikan karena belum optimalnya pengelolaan keuangan terhadap kinerja organisasi.

Fenomena yang terjadi terkait dengan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung terlihat dari masih adanya gejala-gejala seperti:

1. Dalam kegiatan pelaksanaan kinerja belum optimal disebabkan target capaian kerja belum mencapai target 100% seperti yang terdapat dalam tabel rekapitulasi kegiatan BPMP tahun anggaran 2014.
2. Belum lancarnya penyampaian laporan dari hasil pengelolaan keuangan di BPMP yang bisa menyebabkan lambatnya persetujuan dari pusat.
3. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena para aparatur masih membutuhkan masukan-masukan seperti lokakarya, seminar, dan lain-lain.

Karena realita tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dituangkan dalam judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dan data yang di dapatkan di Badan Penanaman Modal dan Perijinan kabupaten Bandung, maka ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya anggaran kegiatan kinerja pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang hanya bisa mencapai 84,4% untuk capaian target 100%.
2. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka kerjasama yang dibuktikan pada tabel rekapitulasi kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan tahun anggaran 2014 yang realisasinya hanya tercapai 87,4% .
3. Kualitas sumber daya manusia pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan hanya tercapai 80% dan masih perlu ditingkatkan kembali.

Berdasarkan masalah diatas pernyataan masalahnya adalah kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung belum optimal diduga antara lain karena pengelolaan keuangan daerah belum efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana realitas kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti selama proses berlangsung adalah:

1. Untuk mengetahui realitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui realitas kinerja dalam organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori tentang ilmu administrasi keuangan negara khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam peningkatan

kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai cara pengelolaan keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi.
- c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Arti dari administrasi keuangan negara menurut Arifin Soeria Atmadja (2010:10) bahwa keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan Negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya, sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.

Ruang lingkup pembahasan administrasi keuangan negara tergantung dari sudut pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang berbeda akan mencerminkan ruang lingkup yang berbeda. Pembahasan Administrasi Keuangan dikelompokkan kedalam lima pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk

administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiscal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan pajak, serta mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk meyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah;

Adapun pengelolaan keuangan daerah dapat didefinisikan menurut Ahmad Yani (2002:348) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Ahmad Yani (2002:348) dimensi pengelolaan keuangan daerah :

- (1) Perencanaan dan penganggaran
- (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan
- (3) Pertanggungjawaban

Kinerja organisasi menurut Baban Sobandi (2006:176) merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *Input, Output, Outcome, Benefit*, maupun *Impact*.

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, yang terkait dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kinerja Organisasi dari teori yang digunakan yaitu teori Baban Sobandi dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan*

Daerah, berikut adalah dimensi kinerja organisasi menurut Baban Sobandi (2006:179) yaitu sebagai berikut:

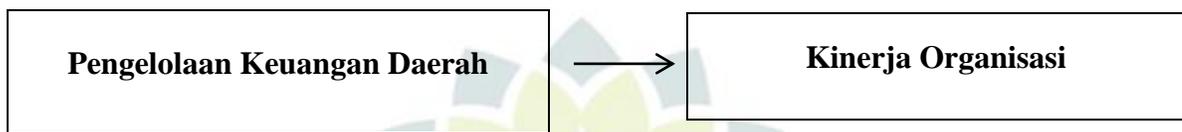
- (1) Keluaran
- (2) Hasil
- (3) Kaitan Usaha dengan Pencapaian
- (4) Informasi Penjelas

Pertama, keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. *Kedua*, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. *Ketiga*, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. *Keempat*, informasi penjelas ini sangat penting untuk menjelaskan kinerja organisasi yang membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang akan dilaporkan.

Kedua konsep diatas merupakan kerangka pemikiran yang dijadikan alasan ilmiah dalam penelitian ini, yaitu: jika pengelolaan keuangan daerah baik maka akan semakin optimal kinerja organisasi. Berdasarkan uraian diatas untuk

menyederhanakan model penelitian, maka model penelitian yang peneliti sajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Penelitian



(Sumber: Peneliti setelah diolah)

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat di uji. Oleh karena itu hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat pernyataan (*declarative*) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu atau lebih variabel dengan variabel lain. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis di uji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran untuk menerima atau menolak jawaban tentatif. (Ulber Silalahi, 2012:160).

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2012:64).

Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2012:69).

H_1 = Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

H_0 = Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul ini sudah pernah di uji oleh beberapa peneliti lainnya, namun di dalam pengambilan penelitian terdahulu ini memiliki fungsi untuk mendapatkan bahan sebagai pembandingan dan sebagai acuan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu maka menghindari pula dari kesamaan data dan kesamaan teori dari isi karya ilmiah yang pernah dilakukan. Maka dengan itu peneliti memaparkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Marjuki Sagala (2011)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan

		Keuangan daerah di Kabupaten Jepara.	terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
2	Chandra Dwipratama (2011)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan APBD di Kota Padang	Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan APBD berpengaruh dengan signifikan dan memiliki hasil pengaruh positif yang baik.
3	Zulkarnain (2012)	Pengaruh efektifitas pegawai terhadap kinerja organisasi di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah maka dapat dinyatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh efektifitas pegawai terhadap kinerja organisasi dan memiliki besaran pengaruh yang cukup tinggi.